

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhmadi, M. H. (2017). Determinan Keberhasilan E-Filing Pajak di Indonesia: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua. *Jurnal Pajak Indonesia*.
- Asmarani, N. G. (2020, Juni 3). *DDTC News*. Diambil kembali dari news.ddtc.co.id: <https://news.ddtc.co.id/beda-penghasilan-pegawai-tetap-bersifat-teratur-dan-tidak-teratur-21297>
- Fatimah. (2021, Mei). *Sobat Belajar : Penghasilan yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21*. Diambil kembali dari <https://www.sobatpajak.com>
- Ferdian, T. (2020, January 29). *5 Titik Kritis Kepatuhan Pajak Bendaharawan Pemerintah*. Retrieved from Direktorat Jenderal Pajak: <https://www.pajak.go.id/id/artikel/5-titik-kritis-kepatuhan-pajak-bendaharawan-pemerintah>
- Fitriani, P. A. (2022, Maret 9). *Asas dan Sistem Pemungutan Pajak Indonesia*. Diambil kembali dari Pajak.go.id: <https://pajak.go.id/id/artikel/asas-dan-tiga-sistem-pemungutan-pajak-indonesia>
- Gosal, Y., Karamoy, H., & Warongan, J. (2017). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2)*, 371-382.
- Gunawan, E. O. (2011, Desember 18). *Definisi pajak menurut para ahli*. Diambil kembali dari Wordpress.com: <https://evaoktaviagunawan.wordpress.com/2011/12/18/definisi-pajak-menurut-beberapa-ahli-ekonomi/>
- Irvan, A. K. (2021). *Tinjauan atas Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pemungutan PPh Pasal 22 Oleh Bendahara Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) SMPN 2 Pace Kabupaten Nganjuk Tahun 2020*. Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Jazuli, M. (2021). *Tinjauan atas Pelaksanaan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 Oleh Bendahara Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Maos Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019*. Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Kadir, A. (2016). *Kapita Selekta Perpajakan di Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Kementerian Agama. (2021). *Kementerian Agama Republik Indonesia*. Diambil kembali dari kemenag: <https://www.kemenag.go.id/>

- Kementerian Keuangan. (2021, Mei). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)*. Diambil kembali dari Kemenkeu.go.id: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/laporan/laporan-keuangan-pemerintah-pusat/>
- Lubis, R. H., & Dewi, R. S. (2017). *Mudah Menghitung dan Mengisi E-SPT Pajak Penghasilan Pasal 21/26*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan, Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.
- Pemerintah Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep dan aspek formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Ratnafuri, K., & Herawati, N. (2012). Malpraktek Pemotongan dan Pemungutan Pajak Oleh Bendaharawan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 3 (3), 334-501.
- Republik Indonesia. (1983). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Ritonga, A. A. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak & Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Pustaka El Manar.
- Waluyo. (2002). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Waskito, A. (2011). *Mudahnya Menghitung Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: Buku Pintar.
- Waskito, A. (2011). *Mudahnya Menghitung Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: Buku Pintar.
- Wibowo, S. (2019). Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan Pemberi Opini atas Laporan Keuangan Audited (Studi Kasus Pada Kementerian di Indonesia). *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 41-52.
- Yosandra, K. A. (2020). *Tinjauan Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 Oleh Instansi Pemerintah Dinas SSL Kota Plg. Tangerang Selatan: PKN STAN*.